

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, dan Andri Desas Furyanto, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, PTIK, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Pemasarakatan, 2008, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*, Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasarakatan bekerjasama dengan Kedutaan Besar Australia, The Asia Foundation, Institute Criminal for Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Djasman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- J.Remelink, 2017, *Pengantar Hukum Pidana Materil 3: Hukum Pemitensir*, Maharsa, Yogyakarta
- J.C.T Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, 2009, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Solly Lubis, 2009, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Medan.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Palu.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, kunjungan Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasarakatan

C. Internet

Kompas.com, *Pidana Alternatif Perlu Didorong*, tersedia:

[http://nasional.kompas.com/read/2016/12/26/20460671/pidana.alternatif.p
erlu.didorong](http://nasional.kompas.com/read/2016/12/26/20460671/pidana.alternatif.p
erlu.didorong)

Oke Zone News, *Pemerintah Dorong Pemberian Remisi & Pembebasan Bersyarat Atasi Over Kapasitas*, tersedia:

[http://news.okezone.com/read/2015/04/28/337/1141096/pemerintah-
dorong-pemberian-remisi-pembebasan-bersyarat-atasi-over-kapasitas](http://news.okezone.com/read/2015/04/28/337/1141096/pemerintah-
dorong-pemberian-remisi-pembebasan-bersyarat-atasi-over-kapasitas)

Padang Ekspres digital media, *Para Napi mengaku Dipersulit di LP*, tersedia :

<http://www.news.padek.co/detail/a/46472>

